

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, W. (2020, Juni 25). *Diduga, Oknum Perangkat Desa Cepokorejo Palang Tuban Menyelewengkan Bantuan BPNT*. Diambil kembali dari SorotNuswantoroNews.com:
<http://www.sorotnuswantoronews.com/2020/06/diduga-oknum-perangkat-desa-cepokorejo.html>
- Alam, A. S. (2009). Analisis kebijakan publik kebijakan sosial di perkotaan sebagai sebuah kajian implementatif. 2(1).
- Alatas, V., Banerjee, A., & Hanna, R. (2019). Does elite capture matter? Local elites and targeted welfare programs in Indonesia. *American Economic Association*.
- Andriyan, L., Murod, M., Sulastri, E., Djoni, G., Sahrul, M., & Andiani, D. (2021). Relasi Kuasa Elit Lokal Dan Pemerintah Lokal Dalam Penangan Konflik Sosial Paska Pilkada Dalam Mendukung Ketahanan Sosial,. 27(1).
- Annafaah , S., & Rahaju, T. (2019). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Jegulo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban. 7(8).
- Bardhan, P., & Mookherjee, D. (2000). Bardhan, P., & Mookherjee, D. (2000). Capture and governance at local and national levels. 90(2).
- Barrientos, A., & Pellissery, S. (2012). *Delivering effective social assistance: Does politics matter?. Effective States and Inclusive Development Research Centre Working Paper*.
- Bayu, A., Kamim, M., & Abrar, M. (2022). Faktor Struktural Ekonomi Dan Konglomerasi Di Tengah Wabah: Bagaimana Konsolidasi Oligarki Terjadi Pada Masa Pandemi Covid-19.
- Birdsall, N., & Londono, J. (1997). Asset Inequality Matters: An Assessment of the World Bank's Approach to Poverty Reduction. *JSTOR*, 87(02).
- Buku, A. G. (1938). *Teori Strukturasi Anthony Giddens Untuk analisis Sosial*. London Utara: Academia.edu.
- Dunn, W. N. (2017). *Pengantar analisis kebijakan publik*.

- Fanny, N., & Megawati, S. (2022). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban. *10*(2).
- Han, H., & Gao, Q. (2019). *Community-Based Welfare targeting and political elite capture: Evidence from rural China*. World Development.
- Heri, S. (2021, Januari 14). *Tim Koordinasi BPNT/BSP Tuban Tinjau Distribusi Komoditi Bantuan Sosial Pangan serta Arahannya*. Diambil kembali dari Situs Resmi Pemerintah Kab. Tuban: <https://tubankab.go.id/entry/tim-koordinasi-bpnt-bsp-tuban-tinjau-distribusi-komoditi-bantuan-sosial-pangan-ini-arahannya>
- Imron, A. (2022, Januari 02). *KPM Penerima KKS BPNT Tambahan Tuban Terbanyak di Tiga Kecamatan*. Dipetik November 10, 2022, dari blokTuban.com: <https://bloktuban.com/2022/01/02/kpm-penerima-kks-bpnt-tambahan-tuban-terbanyak-di-tiga-kecamatan-ini/>
- Imron, A. (2022, Januari Minggu 02). *KPM Penerima KKS BPNT Tambahan Tuban Terbanyak di Tiga Kecamatan*. Diambil kembali dari blokTuban.com.
- Indonesia, P. R. (2010). *Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta.
- Indonesia, R. (2011). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin*. Republik Indonesia.
- John, G. (1999). Political timing: A theory of politicians' timing of events.
- Merriam. (1995). *Encyclopedia of Literature*. Webster.
- Mitra, S. (1997). *Making Local Politics 'Work'; Rural Elites Political Conflict and Legitimacy in India*. Germany: Unpublished.
- Nabila, K., Suharso, P., & Hartanto, W. (2021). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Paleran kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. *15*(2).
- Paler, L., & Strauss Kahn, C. (2020). *Is Bigger Always Better? How Targeting Aid Windfalls affects Capture and Social Cohesion*. Comparative Political.
- pemerintah Republik, I. (2017). *Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017. Tentang penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.

- Pemerintah Republik, I. (t.thn.). *Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta.
- Pemerintahan Republik, I. (2016). *Pemerintah Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016. Tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan*. . Jakarta: Menteri Sosi.
- Ridho, M. Z. (2020). Ridho, M. Z. (2023). LOCAL STRONGMAN DI BANGKALAN: KUASA POLITIK “BLATER” DALAM DEMOKRASI LOKAL 2008-2018. 25(2).
- Sim, A., Negara, R., & Suryahadi, A. (2015). *Sim, A. A., Negara, R., & Suryahadi, A. (2015). Inequality, elite capture, and targeting of social protection programs: Evidence from Indonesia*. . Jakarta :: SMERU Research Institute.
- Subarsono, A. (2012). *Subarsono, A. G. (2012). Analisis kebijakan publik: konsep, teori dan aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subekti, M., Faozanudin, M., & Rokhman, A. (2017). Pengaruh komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi terhadap efektifitas implementasi program bantuan operasional sekolah pada satuan pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Tambak. 3(2).
- Suharto, E. (2006). Negara Kesejahteraan dan Reinventing Depsos. In Makalah disampaikan pada Seminar yang bertema “Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi-Otonomi di Indonesia.
- Suharto, E. (2011). *Suharto, E. (2011). Kebijakan sosial*. Bandung: Alfabeta. Bandung : Alfabeta.
- Supriadi, W. C. (2002). *Fungsi dan peran elit sosial politik dalam masyarakat*.
- Winarno, B. (2012). Winarno, B. (2012). Kebijakan publik: teori, proses, dan studi kasus: edisi dan revisi terbaru. *Center For Academic Publishing*.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (Edisi Kedu)*. Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian yang bersifat: Eksploratif,Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif*. Bandung : Alfabeta.